

BAB I
PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH
(Studi Kasus di SMAN 03 Semarang)

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berbagai ungkapan terlontar untuk mendeskripsikan betapa parahnya korupsi di negeri ini. Pelaku ini tidak hanya berjangkit dikalangan pejabat eksekutif, tetapi juga merambah dikalangan legislatif dan yudikatif, dari pusat sampai ke daerah. Ibarat penyakit, praktik korupsi di Indonesia sudah demikian akut dan menyusup hampir ke seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sudah sewajarnya ketika sejumlah lembaga juga mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa korup. Begitu korupnya, sampai pengamat sosial politik J. Kristiadi, mengatakan korupsi telah menjadi kultur bangsa Indonesia.¹ Berbagai macam upaya dilakukan pemerintah untuk memberantas praktik-praktik korupsi yang sangat parah terjadi di negeri ini. Aksen plan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, untuk memberantas korupsi sampai perlu dibuat Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kini muncul wacana dan kesadaran moral bahwa untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat negeri ini, selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai baru bebas korupsi melalui pendidikan formal². Hal itu dilakukan karena pendidikan³ memiliki

¹ A. S. Burhan dkk, *Memerangi Korupsi ; Geliat Agamawan atas Problem Korupsi di Indonesia*. (Jakarta : Kemitraan Partnership & P3M, 2004). hal. 172.

² Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan, Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lebih lanjut baca UU no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

posisi sangat vital dalam menyemai pendidikan dan sikap antikorupsi. Melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah, generasi baru Indonesia diharapkan memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid berpendapat bahwa pendidikan perlu dielaborasi dan diinternalisasikan dengan nilai-nilai antikorupsi sejak dini. Pendidikan antikorupsi yang diberikan di sekolah diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya.⁴

Menurut Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. A. dalam pendekatan pendidikan, manusia disebut sebagai makhluk eksploratif. Maksudnya manusia memiliki potensi untuk berkembang dan dikembangkan. Beberapa teori pendidikan cenderung menyepakati bahwa untuk mengembangkan potensi manusia diperlukan intervensi dari luar dirinya. Adapun upaya yang di nilai paling efektif untuk mengembangkan potensi tersebut adalah melalui aktivitas yang disebut pendidikan.⁵ Wacana di lingkungan pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini yang santer di cuitkan oleh para analis pendidikan adalah tentang perlunya pendidikan nilai dimasukkan dalam sistem pendidikan.⁶

Banyak kalangan yang mempertanyakan keberhasilan pendidikan agama di sekolah. Hal ini dikarenakan beberapa alasan : (1) rendahnya minat dan kemauan untuk belajar agama, (2) rendahnya kesadaran mengamalkan ibadah, (3) rendahnya kemampuan baca tulis al-Quran, (4) berperilaku bertentangan dengan ajaran agama yang dianut seperti melakukan

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, Kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lihat selengkapnya dalam UU Sisdiknas RI No. 20 tahun 2003, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Cet. 2. hlm.2

⁴ Syarif S, Sabiqul Khair, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, [http://www. freelists. org/post/list_indonesia/ppiindia-Pendidikan-Antikorupsi-di-Sekolah,8](http://www.freelists.org/post/list_indonesia/ppiindia-Pendidikan-Antikorupsi-di-Sekolah,8), acces, 19 Juli 2009

⁵ Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. A. *Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, dalam Suyitno (ed), *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama ; Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi*. (Yogyakarta : Gama Media bekerjasama (LKHI) Fak.Syari'ah IAIN R. Fatah, 2006), hal. 183

⁶ Drs. Ahmad Arifi, M. A., *Politik Pendidikan Islam , Menelusuri Ideologi dan aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi*, (Yogyakarta : TERAS, 2009), hlm. 108

tindak kriminal, anarkhis, premanisme, perkelahian antar pelajar, konsumsi minuman keras, narkoba, dan lain-lain, (5) masih meluasnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua sektor kemasyarakatan. Bahkan terjadinya krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia sesungguhnya berpangkal pada krisis akhlak atau moral. Krisis ini oleh sementara pihak dianggap sebagai kegagalan pendidikan agama.

Secara Umum hubungan antara nilai dengan pendidikan dapat dilihat dari tujuan pendidikan itu sendiri. Seperti yang terdapat dalam tujuan pendidikan nasional, pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab mengandung sejumlah nilai yang penting bagi pembangunan karakter bangsa.

Pendidikan Islam perlu mengembangkan nilai antikorupsi. Sebab dalam sistem⁷ pendidikan nasional, baik dalam kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) maupun Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) belum dimuat materi mengenai permasalahan korupsi di Indonesia secara langsung. Pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui pengaitan materi pembelajaran secara kontekstual dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi. Sehingga dalam pembelajaran, peserta didik tidak hanya di tekankan pada aspek kognitif saja dan pendidikan agama islam harus dikembangkan ke arah internalisasi nilai (afektif) yang tentunya diimbangi dengan aspek kognitif, sehingga peserta didik timbul dorongan yang kuat untuk mengamalkan ajaran dan nilai-nilai dasar agama yang telah terinternalisasikan dalam diri peserta didik.

Pendidikan Islam sebagai bagian integral dari pendidikan Indonesia tentunya mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai antikorupsi. Pendidikan Islam bisa dijadikan sebagai sarana upaya

⁷ Sistem adalah suatu kesatuan unsure yang saling berinteraksi secara fungsional yang memperoleh masukan menjadi keluaran. Baca DR. Hamzah B. Uno, M. Pd dalam bukunya *Perencanaan Pembelajaran*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008). hlm. 11

preventif dan antisipatif dalam mengembangkan nilai antikorupsi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mengetahui lebih jauh, apakah pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada saat ini sudah relevan dengan tuntutan masyarakat untuk mampu menumbuhkembangkan sikap antikorupsi pada anak didiknya, maka dalam skripsi ini penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan judul **”PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH (Studi Kasus di SMAN 03 Semarang)”**

B. PENEGASAN ISTILAH

Kesalahpahaman dalam memahami dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif sangat dibutuhkan agar pembaca dapat menghindarinya, Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk membatasi istilah yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Penanaman Nilai

Penanaman berasal dari kata “tanam” yang mengandung arti memberikan dasar, benih, atau bibit, dalam hal ini agama. Sehingga mengandung arti menaburkan faham ajaran dan sebagainya.⁸ Sedangkan “penanaman” sendiri berarti proses, cara melakukan sesuatu perbuatan, menanamkan sesuatu ke dalam diri manusia yang disebut pendidikan.⁹ Dan yang dimaksud sebagai dasar di sini adalah nilai-nilai ajaran Islam.

Nilai adalah daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang.¹⁰ Sedangkan menurut Milton Roceach dalam *Kartawisastra* (1980: 1) Nilai adalah Suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan atau

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm.1008

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Kontempore*,. (Jakarta : Modern English Press, 1991), hlm. 1035

¹⁰ EM. K. Kaswardi, *Pendidikan nilai Memasuki tahun 2000*. (Jakarta : PT. Grasindo, 1993). hlm. 24-25

mengenai suatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki dan dipercayai.¹¹

Jadi, dari pengertian di atas nilai¹² merupakan sifat yang melekat pada sesuatu yang berhubungan dengan subyek/manusia (dalam hal ini manusia selaku pemberi nilai). Sehingga penanaman nilai dapat diartikan sebagai wujud aplikasi dari apa yang di peroleh dari pendidikan yang kemudian di transformasikan secara sadar ke dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

2. Anti Korupsi

Menurut Andi Hamzah Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Coruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke bahasa eropa, seperti inggris yaitu, *corruption, corrupt* ; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie, korrupcie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹³

Kata "korup" berarti buruk atau rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya dapat disogok/suap (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi) dan korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁴ Sedangkan Poerwadarminta, mengatakan korupsi adalah perbuatan yang buruk (penggelapan uang, penerimaan uang sogok).¹⁵

Poerwadarminta dalam "Kamus Umum Bahasa Indonesia" :
Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan

¹¹ Mawardi Lubis, *Evaluasi Pendidikan Nilai*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 16.

¹² Nilai bila di lihat dari sumbernya terdapat 2 Jenis : nilai ilahiyah & nilai insaniyah, nilai ilahiyah adalah nilai yang bersumber dari agama (wahyu Allah) sedangkan nilai insaniyah yaitu nilai yang di ciptakan manusia atas dasar kriteria yang diciptakan oleh manusia pula. Baca. Mawardi Lubis, *Evaluasi Pendidikan Nilai*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 19

¹³ Arya Maheka, *Mengenal dan memberantas KORUPSI*, (KPK). Hlm. 12

¹⁴ DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005). Hlm. 597

¹⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III (Jakarta : Balai Pustaka, 2006). Hlm. 616

uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No. 31 th. 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 th 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan/korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.¹⁶ Dalam pembahasan kali ini anti korupsi dimaknai sebagai nilai-nilai yang berlawanan dengan sikap korupsi, atau dapat dikatakan nilai yang bertentangan dengan sikap korupsi yang selama ini dijadikan sebagai penyakit yang dapat merusak tatanan masyarakat khususnya terkait dengan perilaku atau moral bangsa.

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan dalam bahasa Arab berarti *Ta'dib* yang tekanannya tidak hanya pada unsur-unsur ilmu pengetahuan (*'ilm*) dan pengajaran (*ta'lim*) belaka, tetapi lebih menitik beratkan pada pendidikan diri manusia seutuhnya (*tarbiyatu nafs wal akhlaq*).¹⁷

Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam ialah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (*way of life*).¹⁸

Pendidikan agama Islam juga diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.¹⁹

¹⁶ Arya Maheka, *Op.Cit.* hlm. 14

¹⁷ M. Basyaruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta : Ciputat Pers, 2002), hlm. 45.

¹⁸ Zakiah Daradjat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta ; PT. Bumi Aksara, Cetakan kelima, 2004), hlm. 86.

¹⁹ Muhaimin, dkk., *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam*, (Bandung : Rosdakarya, 2002. 75-76.

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan sebutan yang diberikan pada salah satu subjek pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa Muslim dalam menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu. Ia merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum suatu sekolah, sehingga merupakan alat untuk mencapai salah satu aspek tujuan sekolah yang bersangkutan. Karena itu, subjek ini diharapkan dapat memberi keseimbangan dalam kehidupan anak kelak, yakni manusia yang memiliki “kualifikasi” tertentu, tetapi tidak lepas dari nilai-nilai agama Islam.²⁰

4. Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaktif yang berlangsung antara guru dan siswa dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap serta memantapkan apa yang dipelajarinya itu.²¹

Jadi, pelaksanaan pembelajaran disini yaitu merupakan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana memperoleh, memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dalam hal ini mencakup pembelajaran pendidikan agama islam. Dimana dalam pelaksanaan pembelajaran disini meliputi materi, metode, serta evaluasi penanaman nilai anti korupsi yang digunakan di SMAN 03 Semarang yang dalam praktek pelaksanaan kesehariannya disesuaikan dengan SKH (Satuan Kegiatan Harian) yang sudah dibuat oleh guru sesuai tema yang sudah dipilih.

Proses pembelajaran harus diupayakan dan selalu terikat dengan tujuan (goal based). Oleh karenanya, segala interaksi, metode dan kondisi pembelajaran harus direncanakan dan mengacu pada tujuan pembelajaran yang dikehendaki.

²⁰ Ibnu Hadjar, *Pendekatan Keberagamaan Dalam Pemilihan Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam*, dalam buku Chabib Thoha, dkk., (tim perumus), *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar & Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang , 1999), hlm. 4.

²¹ S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 102.

C. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari uraian di atas peneliti mengambil rumusan masalah yang akan dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 03 Semarang ?
- b. Bagaimana problem dan solusi yang di hadapi dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 03 Semarang ?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bukan sekedar bertujuan untuk mengesahkan asumsi penulis, namun lebih pada tujuan awal dari penelitian itu sendiri, yaitu :

- a. Mengetahui bagaimana nilai-nilai anti korupsi ditanamkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 03 Semarang?
- b. Mengetahui problem dan solusi yang dihadapi dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 03 Semarang

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam dunia pendidikan khususnya di bidang Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman di dalam menyampaikan materi atau pengajaran dalam Pendidikan Agama Islam serta mengkritisi proses pembelajaran yang dilakukan di berbagai lembaga pendidikan dalam perannya sebagai proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi.
- b. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca berupa informasi mengenai problematika kontemporer, serta hal- hal yang berkaitan dengannya, terutama konsep kependidikan terkait dengan problematika korupsi. Sehingga

mampu membuat pemikir/pendidik pendidikan islam bersikap aktif untuk mengarahkan agar peserta didik mampu mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan islam dan memerangi kejahatan korupsi sebagai wujud perlawanan terhadap penyakit masyarakat /kemungkaran sosial.

E. TELAAH PUSTAKA

Karya yang terkait dengan tema pendidikan anti korupsi sebenarnya telah cukup banyak diulas. Sehingga membuat penulis merasa tertarik untuk melanjutkan apa yang sekiranya belum diteliti. Karya yang cukup penting *Pertama: Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi: Studi Konteks Kurikulum dan Proses Pembelajaran IAIN Raden Fatah Palembang*, yang ditulis oleh Afriantoni, mahasiswa S2 progam pasca sarjana IAIN Raden Fatah Palembang, dalam buku Suyitno (ed), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama*; mewacanakan fikih anti korupsi, (Yogyakarta : Gama Media, 2006).

Dalam buku tersebut merupakan refleksi terhadap persoalan keseharian yang dihadapi oleh umat manusia, yang perlu diperhatikan, dalam tulisan tersebut mencoba untuk kritis menyoroti persoalan fundamental dalam perguruan tinggi khususnya IAIN Raden Fatah, seperti korupsi di birokrasi kampus, lembaga kemahasiswaan, dosen dan bahkan mahasiswa.

Titik tekan dalam buku ini lebih pada kurikulum perguruan tinggi sebagai obyek penelitian. Dengan demikian terkait dengan kurikulum yang ada di sekolah belum ada pembahasan.

Kedua : Masruh (3102188), Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya “*Penanaman Nilai-Nilai Life Skill Keagamaan Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Mangkang Kulon Semarang*” menjelaskan bahwa penanaman nilai-nilai *life skill* keagamaan yang harmonis (sempurna) diperlukan kesinambungan antara kebiasaan suatu kegiatan dan penanaman nilai-nilai keagamaan pada santri, di perlukan

aturan-aturan kepesantrenan, diantara nilai-nilai *life skill* keagamaan yang di kembangkan adalah keimanan, ketaatan, dan ketakwaan.

Ketiga : Skripsi saudara Ahyani, NIM : 3197012, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, dengan Judul : “*Relevansi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan Pengembangan Religiusitas Siswa*”. Dalam skripsi ini peneliti mencoba untuk mengetahui relevansi dari Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan pengembangan religiusitas siswa.

Atas dasar itu, maka penulis merasa perlu untuk melacak dan melihat kembali kurikulum yang ada di sekolah khususnya SMA, sebagai upaya menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum KTSP Pendidikan Agama Islam.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai metode-metode tersebut sebagai berikut :

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam Pendidikan Agama Islam, maka fokus penelitian kali ini adalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 03 Semarang. Dipilihnya SMAN 03 Semarang sebagai subyek penelitian ini disebabkan karena keberadaan SMAN 03 Semarang itu sendiri yang memiliki kelebihan di bandingkan dengan sekolah yang lain, mulai dari budaya dan tradisi pendidikannya serta merupakan sekolah favorit di Kota Semarang.

2. Jenis Penelitian.

Skripsi dengan judul “*Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Studi Kasus di SMAN 03 Kota Semarang)*” merupakan jenis penelitian kualitatif (*Qualitative*

Research). Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dan dalam peristiwanya.²² Sementara itu Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati²³

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan topik yang akan dibahas dan dikaji dalam skripsi ini, maka penelitian ini mempergunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis digunakan dalam membahas wacana dan fenomena sosial yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penelitian ini, serta melihat pengalaman (*empiric*) dalam menerapkan pendidikan antikorupsi.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dalam penelitian ini tidak ada kata lain kecuali menjadikan peneliti sebagai instrumen utama. Peneliti sebagai instrumen mengantarkan kepada pembentukan sikap yang menuntut agar diri sendiri memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai macam realitas yang tidak dapat dikerjakan oleh instrumen selain manusia, yakni mampu menangkap makna, berinteraksi yang momot nilai, lebih-lebih untuk menghadapi nilai-nilai lokal yang berbeda.²⁴

²² Lexy J. moleong, *Metode penelitian kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 1995). Hlm 3

²³ Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta; Rieneka Cipta, Cet I, 1997). hlm 36.

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Serasin, 1996), hlm. 109.

5. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁵ Secara sederhana data ini disebut juga data asli, data primer dapat diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara secara langsung (*direct interview*) serta observasi secara langsung dan mendalam di lokasi penelitian

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁶

Data sekunder untuk skripsi ini diperoleh dari buku-buku atau majalah sebagai penunjang dari data primer. Sumber ini biasanya berbentuk dokumen-dokumen, seperti; data tentang demografis suatu daerah, data tentang persediaan pangan suatu daerah, data jumlah penduduk dan lain sebagainya

6. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi, Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek.²⁷ Dalam definisi yang lain observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁸

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi secara umum Lembaga pendidikan di SMAN 03 Semarang, meliputi letak geografis, sarana prasarana dan fasilitas lainnya. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995) cet. XI. hlm. 84-85

²⁶ Sugiyono, *Op. Cit.* hlm. 62

²⁷ Margono. *Ibid.* hlm 158

²⁸ Soetrisno Hadi., *Metodologi Research*, (Yogyakarta; Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, Jilid I, 1980). hlm 136.

partisipan (*Participant Observation*)²⁹ dan observasi non partisipan (*Non-Participant Observation*).³⁰

Adapun instrumen observasi dapat berupa instrumen teknis dan instrumen non teknis. Instrumen teknis dapat berupa alat-lat elektronik seperti tape recorder, tustel dan lain sebagainya sedangkan instrumen non teknis berupa *field note (guide line)* tentang apa saja yang akan di observasi. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengamati secara langsung tentang bagaimana pembelajaran PAI yang ada di SMAN 03 Semarang dan mencoba menganalisis sejauhmana kontribusinya terhadap pendidikan antikorupsi.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³¹

Metode ini dilakukan untuk mengetahui alat/benda yang dianggap penting untuk menunjang penelitian misalnya surat keputusan, surat instruksi, Silabus, dll.

c. Metode Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.³² Dalam metode ini dapat dikatakan bahwa terjadi pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, sehingga dapat melengkapi data-data yang

²⁹ Observasi ini sering digunakan dalam penelitian eksploratif . yang dimaksud dalam obserfasi partisipan adalah apabila observasi (orang yang melakukan observasi) turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyaeq yang di observasi (disebut observes), apabila observasi partisipan tetapi unsur partisipan sama sekali ada pada observer dalam kegiatannya maka disebut observasi non partisipan. Lihat *Metodologi penelitian*, Abu Ahmadi, Bumi Aksara, Jakarta, 1997 hlm 72

³⁰ Djoko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, , 1997). hlm. 63.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi Revisi VI (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

³² W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2004), hlm. 119.

dibutuhkan, melalui wawancara lisan maupun tertulis. Wawancara juga dapat dilakukan dengan bentuk formal maupun informal.

Wawancara dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara, tetapi peneliti senantiasa berusaha mengembangkan wawancara di sekitar peranan, sikap dan harapan-harapan para informan dalam berbagai peristiwa, persoalan dan perubahan. Wawancara akan peneliti arahkan di sekitar persoalan atau pernyataan yang pernah dikemukakan informan yang terekam melalui pengamatan.

Para informan di pilih secara purposif dengan sasaran memperoleh data yang maksimal dari orang-orang yang memiliki peranan penting di sekolah atau memiliki banyak informasi mengenai persoalan-persoalan penanaman nilai di sekolah, seperti masalah peran kepala sekolah, peran guru, murid proses pembelajarannya. Wawancara seperti itu selalu direkam dan atau di catat, untuk di dengar kembali pada waktu lain.

Selain wawancara formal, wawancara informal juga dilakukan dalam berbagai kesempatan. Bentuk wawancara ini menyerupai obrolan dan bisa dengan sejumlah warga sekolah (guru, murid, kepala sekolah, karyawan, dan lain-lain), pembicaraan yang relevan dengan penelitian ini diingat dan dicatat pada kesempatan lain.

7. Metode Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami.³³

- a. Analisis deskriptif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah penelitian yang di maksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian.³⁴ Langkah-langkah dalam metode ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah, mendefinisikan, merumuskan,

³³ Sugiyono, *Ibid*, hlm. 88

³⁴ Prof. DR. Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), hlm. 41

mengumpulkan dan menganalisis data kemudian menyusun. Jadi, maksud dari metode ini yaitu berusaha untuk mendeskripsikan, membahas dan menggali gagasan-gagasan pokok yang selanjutnya di tarik pada satu kasus baru. Dalam hal ini ide pokok yang menjadi dasar penelitian adalah nilai-nilai antikorupsi sebagai strategi pencegahan korupsi melalui sektor pendidikan formal.

- b. Analisis Komparasi, Yaitu suatu penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan-hubungan sebab akibat yaitu meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki yang membandingkan faktor yang satu dengan faktor yang lain (Suharsimi Arikunto, 1998: 247). Jadi, maksud dari metode ini adalah mencoba untuk mendeskripsikan dan mengaitkan landasan teori yang ada dengan data yang ada di lapangan yang kemudian di tarik dalam sebuah kesimpulan.